

Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur)

Fitri Rahmadania

Abstrak

Penurunan suara yang dialami oleh PPP Sampang menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena PPP Sampang merupakan salah satu lumbung suara di Jawa Timur. Rekrutmen politik terhadap calon legislatif DPC PPP Sampang menjadi salah satu pemecahan terhadap penurunan suara yang telah dialami PPP Sampang. Penelitian ini membahas tentang rekrutmen calon legislatif pada pemilu 2014 studi kasus mengenai rekrutmen politik PPP Sampang di dapil I dan dapil V. Tujuan penelitian ini untuk dapat memahami bagaimana proses yang dilakukan PPP Sampang dalam melaksanakan rekrutmen calon legislatif yang memiliki motif untuk meningkatkan suara PPP di Kabupaten Sampang dalam pemilu 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif.

Rekrutmen politik yang dilakukan PPP Sampang dengan menggunakan faktor formalitas yang secara aturan dengan mendaftar, menyeleksi, hingga menjadi daftar calon tetap. Faktor kedua yaitu pertimbangan informalitas dimana hal ini dapat diluar formalitas dengan adanya pertimbangan kebudayaan sosio kultural, jaringan, kekerabatan, dan juga sumber daya keuangan. Dengan melakukan rekrutmen menggunakan faktor formalitas dan informalitas secara seimbang maka diharapkan dapat mewujudkan popularitas yang tinggi dan elektabilitas yang baik.

Kata Kunci: PPP, Pemilu 2014, Caleg, Rekrutmen, Informal, Formal

Pendahuluan

Dinamika politik di Indonesia pada pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan isu pemilu dan partai politik, menarik untuk diteliti. Perubahan-perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang dibawa oleh Amandemen UUD 1945 membuka ruang yang sangat lebar untuk kajian politik pemerintah di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah transformasi sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia. Jika pada masa Orde Baru hanya ada tiga partai politik yang diperbolehkan berdiri dan mengikuti pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sementara pada pasca Orde Baru kebebasan cukup luas diberikan untuk mendirikan partai politik dan mengikuti pemilu. Banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu menjadikan Indonesia menganut sistem multi partai. Sistem pemilu legislatif dari proporsional tertutup yang diterapkan pada masa Orde Baru kini menjadi proporsional daftar terbuka. Sistem multi partai dan sistem proporsional daftar terbuka berimplikasi pada

persaingan yang sangat ketat diantara partai politik dan calon legislatif dalam memenangi kursi di lembaga legislatif.

Dari ketiga partai politik (PPP, PDI, dan Golkar) yang sudah eksis sejak Orde Baru, PPP dalam perhitungan nasional mengalami penurunan suara hingga mencapai 5%. Sementara PDI dan Golkar walaupun juga sama-sama mengalami penurunan tetapi masih memperoleh suara di atas 10%. Penurunan suara PPP diatas menunjukkan bahwa konstruksi ideologi Islam yang diusung PPP tidak menjadi jaminan untuk menarik massa pemilih Islam. Dalam perhitungan suara PPP di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang suara nasional yang tergolong penyumbang suara rendah dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Perolehan suara PPP pada sistem multi partai tersebut berbanding terbalik ketika masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru perolehan suara PPP itu kuat, karena PPP merupakan yang direkomendasikan kyai-kyai. Di kabupaten Sampang memiliki tokoh PPP nasional sosok kyai yang digadag-gadag dan pernah menjadi nominasi tokoh terkenal urutan 10 besar di Asia yaitu KH. Alawi. Keadaannya berbanding terbalik pada saat sistem multi partai disebabkan para kyai-kyai dukungannya terpecah untuk diberikan kepada partai-partai yang baru seperti PKB dan PKS. Dengan adanya multi partai ini, maka setiap partai akan saling bersaing untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menarik minat para pemilih melalui para calon legislatif yang maju di dalam pemilihan umum.

Pada pemilu 2014 PPP memiliki strategi untuk mengangkat perolehan suara dengan menggunakan salah satunya yaitu rekrutmen politik calon legislatif Kabupaten Sampang dengan menggunakan dua faktor yaitu formalitas dan informalitas. Pada dasarnya, bakal calon legislatif yang telah memenuhi kriteria dan terpilih secara formal merupakan hasil keputusan yang sah yang ada di dalam sebuah partai politik. Tetapi, dalam pembuatan keputusan mengenai calon legislatif yang akan maju di dalam pemilihan umum terkadang tidak terlepas dari pengaruh faktor informal, seperti adanya pengaruh kyai yang ada di Sampang. Fenomena seperti ini terjadi di suatu daerah yang masih kental dan berpegang teguh dengan agama. Perilaku pemilih masih kental dengan budaya keagamaannya dan sangat santun pada kyai. Oleh karena itu peran kyai sangat besar dalam perolehan suara di Sampang karena kyai memiliki wewenang dan kekuasaan tersendiri serta dihormati oleh masyarakat. Selain peranan kyai pertimbangan informalitas lainnya dengan menggunakan kekuatan kekerabatan, jaringan, blater (tokoh bajingan), dan sumber daya keuangan.

Teori Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam (Subakti, 2010 : 150).

Partai politik di Indonesia masing-masing memiliki cara sendiri untuk merekrut kader-kader dalam keanggotaan struktur partai politik. Selain itu setiap partai politik merekrut untuk dijadikan dalam keanggotaan di kursi parlemen. Parpol merekrut berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki oleh parpol tersebut yang berkaitan dengan perekrutan, baik keanggotaan struktur harian parpol maupun keanggotaan dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif. Dasar penguat dari suatu partai politik yaitu memiliki keanggotaan yang kuat dalam hal ini dimaksudkan bahwa jumlah anggota yang dimiliki parpol semakin banyak maka dasar kekuatannya pun juga kuat. Selain itu, untuk dapat menjalankan fungsi parpol secara maksimal harus memiliki kursi di parlemen baik daerah, provinsi, maupun pusat.

Studi Pippa Noris menjelaskan bagaimana melihat rekrutmen para anggota legislatif yang dimulai dari level yang lebih rendah dan kemudian berkariir sebagai anggota parlemen. Dalam prakteknya, politisi tidak memulai langkah-langkahnya dari yang lebih rendah dan kemudian berkariir sebagai anggota parlemen. Ada empat level analisis yang harus dilakukan. *Pertama*, sistem hukum, khususnya aturan-aturan legal, sistem kepartaian, dan sistem pemilihan umum yang membuka peluang kesempatan bagi para kandidat di dalam percaturan politik. *Kedua*, proses rekrutmen yang secara khusus terkait dengan derajat internal demokrasi didalam organisasi partai dan ketentuan yang mengatur seleksi kandidat. *Ketiga*, penawaran kandidat yang berkeinginan untuk dipilih menduduki jabatan tertentu sebagai sebagai konsekuensi dari motivasi dan modal politik mereka. *Keempat*, adalah tuntutan pendukung atau pimpinan-pimpinan politik yang ikut melakukan seleksi dari sumber kandidat.

Studi rekrutmen berada di titik temu antara penelitian partisipasi politik masa, pemilu, dan perilaku pemilihan elit politik, anggota legislatif, organisasi partai, dan lobbyist, juga baru-baru ini dengan adanya globalisasi timbulnya masalah gender dan etnis menjadi permasalahan dalam rekrutmen. Dalam penelitian International Parliamentary Union, di lebih dari 32 negara jumlah anggota parlemen wanita harus memenuhi sampai 30% kuota dan munculnya Ras. Keberagaman ini membuat tekanan yang cenderung membuat studi rekrutmen ini tidak memiliki fokus karena tiap prespektif memiliki teori masing-masing yang menguatkan prespektif tersebut.

Untuk memahami rekrutmen studi ini berusaha untuk menghubungkan dua elemen dari prespektif ini. Studi elit politik berhubungan dengan komposisi sosial dalam parlemen. Jika studi organisasi partai berfokus pada bagaimana prosesnya dan bagaimana proses seleksi itu menunjukkan distribusi kekuatan dalam suatu partai. Partai memiliki fungsi menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, fungsi ini dijalankan dengan mempersiapkan agenda-agenda legislatif yang diperuntukan kepada pemerintah dan merekrut kandidat-kandidat legislatif. Dalam memilih kandidat selectorate menentukan target perolehan kursi dan jabatan yang diperoleh didalam parlemen itu sendiri dan akhirnya menyaring kandidat-kandidat yang masuk kriteria pada penentuan parlemen tersebut. Di Inggris hanya memiliki satu cara untuk dapat menjadi anggota parlemen, berbeda dengan Amerika dan Canada yang memiliki banyak cara untuk menjadi anggota parlemen.

Dalam tulisannya yang berjudul Political Recruitment tahapan-tahapan dalam proses

rekrutmen terbagi menjadi 3 tahap yaitu, Pertama sertifikasi, meliputi undang-undang pemilu, aturan-aturan partai dan norma-norma sosial informal yang menentukan kriteria untuk kandidasi yang memenuhi syarat. Kedua adalah nominasi, meliputi tersedianya jabatan yang memenuhi syarat dan adanya permintaan dari selektor untuk memutuskan siapa yang dinominasikan. Dan tahap Ketiga adalah, pemilihan yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang menang dalam jabatan legislatif (Norris, 2006 : 90-91).

Proses sertifikasi menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kandidat jabatan terpilih dibentuk sejumlah faktor. Analisis yang komperhensif dan detail dari persyaratan-persyaratan legal, formal untuk kandidasi berdasarkan dokumen-dokumen konstitusional dan undang-undang pemilu. Regulasi legal utama meliputi umur, kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, kecocokan, deposito uang dan perlunya dukungan.

Proses sertifikasi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial informal dan nilai-nilai budaya di masing-masing negara yang membentuk persepsi dari masing-masing nominasi seperti latar belakang dan pengalaman yang cocok untuk karir legislatif. Sedangkan untuk kandidat independen harus memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan legislatif tanpa dukungan partai politik. Calon independen akan sukses di negara-negara dengan perkecualian organisasi partai yang lemah.

Partai politik mempunyai peran sentral dalam menominasi kandidat legislatif dan mereka juga membentuk "*supply*" kandidat potensial dengan cara membuat jaringan sosial, pelatihan, keterampilan dasar, dan pengalaman organisasional yang berharga dalam memenangkan jabatan pilihan. Menurut Schattschneider, proses nominasi menjadi proses yang krusial dalam partai politik. Siapa yang bisa menentukan nominasi atau nomor urut adalah pemilik partai politik. Sedikit negara yang mempunyai undang-undang mengatur tentang nominasi calon legislatif. Kebanyakan partai memiliki aturan dan kebijakan masing-masing tentang menentukan nominasi kandidat legislatif.

Sistem pemilu menjadi kritis dalam menentukan tahapan untuk memasuki kursi parlemen. Suksesnya pemilihan kandidat juga dibentuk oleh non partisipan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah faktor informal. Seperti adanya dukungan yang diberikan oleh media massa, memenuhi kuota wanita, dukungan finansial/ sumber daya keuangan parpol, ketokohan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lainnya yang memiliki pengaruh dalam suksesnya pemilihan kandidat. Bentuk-bentuk dukungan ini penting utamanya untuk partai politik yang memiliki struktur organisasi yang lemah dan kurangnya sumber institusional.

Norris menjelaskan pada gambar I.2 bahwa sistem hukum (legal requitment) bahwa proses rekrutmen memiliki berbagai aturan dan prosedur, baik yang bersumber dari aturan yang diluar partai maupun aturan internal partai. Legal requitment merupakan faktor formalitas politik yang segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan seperti dalam rekrutmen harus memenuhi syarat yang berlaku, tahap penyeleksian, hingga tahap penetapan. Kemudian faktor informal dengan bagaimana mempengaruhi tawaran dari para kandidat (supply of aspirants) kepada penjaga pintu atau yang menentukan kandidasi. Hal seperti ini akan terjadi antara penawaran dan tuntutan saling berinteraksi yang kemudian

menghasilkan output berupa politisi yang direkrut untuk menduduki posisi kursi jabatan pemerintah/parlemen.

Pembahasan

Perubahan sistem partai yang menonjol terlihat pada era reformasi, ketika Pasca Orde Baru. Sistem kepartaian menjadi sistem partai yang multi partai, karena sebelumnya partai politik hanya ada 3 partai politik, dan semua sistem pemerintahannya yang otoriter. Dalam sistem multi partai muncul aturan pada pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Gabungan yang dimaksud disini artinya minimal terdapat 3 partai politik gabungan atau lebih. Dengan kondisi ini berarti partai politik harus lebih dari 3 yang terbentuk di Indonesia. Sejak kemerdekaan sebenarnya Indonesia sudah mengamalkan pasal tersebut melalui keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen. Tetapi pada pemerintahan Orde Baru yang di Pimpin presiden Soeharto merasa bahwa terlalu banyaknya Partai Politik akan mengganggu stabilitas partai. Setelah keluarnya steatmen seperti ini, maka Presiden Soeharto mengadakan penyederhanaan Partai Politik menjadi 3 Partai Politik yang didalamnya merupakan Partai Politik gabungan yaitu partai (Golkar, PPP, PDI). Sistem ini nampaknya seperti sistem partai tunggal, walaupun didalam 3 partai tersebut terdapat 10 gabungan partai politik tetapi tetap membatasi ruang gerak antara kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sistem ini berbeda dengan sistem kepartaian yang terjadi Pasca Reformasi dimana sistem politiknya berubah menjadi demokrasi liberal. Yang memberikan semua keputusan dan kebutuhan kembali pada tangan rakyat.

Salah satu partai di Indonesia yang dianggap mewakili aspirasi rakyat yaitu PPP. PPP merupakan Partai Politik Islam yang tertua. PPP juga merupakan Partai yang berdiri ketika terjadi peminimalan Partai politik saat Orde baru. setelah Pasca Orde Baru, posisi PPP mengalami penurunan dalam prestasi untuk mempertahankan perolehan suaranya. Karena timbulnya partai-partai Islam baru yang muncul dan mengalahkan perolehan suara PPP. munculnya partai-partai islam seperti PKB, PBB, dan PAN.

Penurunan suara yang terjadi pada PPP Nasional, juga dialami kepada PPP di Sampang dimana Sampang merupakan lumbung suara PPP di Jawa Timur. Perolehan suara yang menurun di Kabupaten Sampang dapat dilihat dari perolehan kursi legislatif DPRD pada periode 1999 mendapatkan 12 kursi, kemudian periode 2004 mendapatkan 17 kursi dan periode 2009 mendapatkan 6 kursi. Perolehan suara PPP Sampang mengalami dinamika naik turun tetapi penurunan yang terakhir mengalami penurunan yang drastis. Dengan kondisi yang seperti ini salah satu penyelesaian agar memperoleh suara yang meningkat dengan melakukan rekrutmen politik calon legislatif PPP Sampang pada periode 2014 yang akan datang.

Rekrutmen politik yang digunakan dengan menggunakan proses formalitas dan juga pertimbangan informalitas. Formalitas politik merupakan proses-proses kelembagaan yang berlangsung didalam partai yang di dasari oleh institusi sesuai dengan prosedur partai, undang-undang partai, dan aturan-aturan partai/ADART. Formalitas merupakan salah satu proses untuk menguatkan kelembagaan suatu partai agar tercipta kader-kader yang memiliki

kualitas yang memang mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi partai. Proses formalitas ini dilakukan oleh DPC PPP Sampang dengan membentuk tim yaitu Lajenah Penetapan Calon dan Lajenah Pemenangan Pemilu. Formalitas politik ini menetapkan hingga adanya daftar calon tetap.

Pada kenyataannya kondisi yang seperti ini tidak cukup menarik perolehan suara karena selain formalitas politik juga memerlukan informal politik. Adanya keterbatasan dalam formalitas politik karena formalitas ini hanya mengamati apa yang ada didalam partai, pola ini tidak bisa menjelaskan bagaimana sesungguhnya pengaruh-pengaruh kultural ini juga mempengaruhi perolehan suara partai politik. Oleh karena itu informal politik juga ditawarkan untuk membantu menjelaskan bagaimana proses rekrutmen politik itu terjadi. Hubungan formal dan informal itu saling menekan dalam rekrutmen politik. Melalui informal ini akan memunculkan calon-calon yang bisa mengangkat perolehan suara dengan menumbuhkan popularitas partai. Informal politik ini dapat dilakukan dengan melalui pertimbangan yang didalamnya terdapat kategori-kategori yang diluar formalitas seperti adanya peranan ketokohan (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Blater), selain itu peranan wanita juga dipertimbangkan untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh aturan pemilihan umum.

Proses formalitas dengan menentukan kandidasi berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan baik ketentuan pemerintahan maupun ketentuan internal partai. Kondisi yang dialami oleh PPP Sampang juga melewati proses formalitas dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan seperti memenuhi persyaratan pendaftaran, ketentuan pendidikan, ketentuan usia, ketentuan berperilaku baik, dan ketentuan kesehatan. Jika persyaratan telah terpenuhi maka akan ada penyeleksian dengan secara tertulis maupun wawancara. Test tulis yang dilakukan dengan membahas sekitar pemerintahan, dan wawancara bertujuan untuk memahami bagaimana visi misi yang akan diwujudkan ketika terpilih menjadi calon yang akan menduduki kursi parlemen. Proses ini dilakukan oleh tim LPC (Lajenah Penetapan Calon) dan dibantu oleh LPP (Lajenah Pemenangan Pemilu), kedua tim inilah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan rekrutmen politik pada PPP Sampang. kedua tim tersebut yang menentukan kandidasi yang akan dicalonkan melalui tahap kandidasi formal partai, dan dalam penyeleksiannya sistem pemilihan. Kondisi yang seperti ini tidak cukup untuk mengangkat perolehan suara dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan partai politik mengikuti pemilu karena, melalui proses formal tidak cukup. Proses formal hanya menentukan kandidasi yang berkualitas melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Tetapi diluar formalitas ini juga dibutuhkan adanya informal politik, karena dengan informal ini dapat melengkapi kekurangan dari proses formalitas politik. Hal ini terjadi karena dalam pemilihan umum juga di perlukan adanya faktor-faktor informal seperti ketokohan, sosial budaya, jaringan, dan sumber daya keuangan partai. Informalitas yang menonjol pada PPP Sampang yaitu dengan menampilkan adanya ketokohan seperti kyai dan tokoh masyarakat. Di dapil V terdapat banyak pondok pesantren diantaranya Pondok Pesantren Nahdlotut Tullab (Prajan), Ponpes Al- Furjan (Prajan), Ponpes Al Istianah (Camplong), Ponpes Darul Ulum (Omben), Ponpes Al Hidayah (Omben), Ponpes Darusallam (Omben), dan Ponpes Al Ikhsan (Jarangoan). Ponpes tersebut telah memberikan dukungannya terhadap PPP selain memberi dukungan ada juga yang mendapat kursi calon legislatif yang mendaftar kepada PPP dan siap memberi dukungan serta doa dan restunya terhadap PPP. Sampang masih kental akan budaya yang mempercayai

adanya restu dari para kyai, apa yang telah menjadi rekomendasi kyai itu lah yang menentukan seberapa kuat partai politik terhadap pandangan masyarakat. Kepercayaan dan kekentalan masyarakat Sampang terhadap peranan kyai mengakibatkan PPP mencari calon salah satu pertimbangan melalui keluarga kyai.

Pertimbangan rekrutmen politik pada dapil V yang tidak memenuhi persyaratan formalitas dipertimbangkan melalui prosedur informalitas salah satunya dengan meminta pertimbangan dan rekomendasi para kyai-kyai. Beberapa calon yang terdapat di dapil V tidak memenuhi prosedur formalitas dan dapat menjadi daftar calon tetap dengan pertimbangan informal dimana calon tersebut masih memiliki keturunan kerabat Ponpes seperti calon yang bernama Musyrifah yang berasal dari Ponpes Al Furjan. Musyrifah dipertimbangkan menjadi daftar calon tetap dengan tujuan agar dapat memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam aturan rekrutmen caleg, selain itu pertimbangan lainnya Musyrifah juga masih memiliki darah kerabat kyai yang berada di Ponpes Al Furjan. Selain itu ada juga yang bernama Muzemil yang tidak lolos dalam prosedur formalitas. Muzemil bukan seorang kader dan juga tidak lolos dalam tes tulis tetapi Muzemil terdaftar menjadi daftar calon tetap di dapil V karena Muzemil masih memiliki keturunan keluarga kyai dari Ponpes Al Ikhsan. Dan juga beberapa calon lainnya. PPP Sampang meyakini bahwa faktor informal dengan adanya ketokohan kyai dengan budaya warga Sampang akan meningkatkan perolehan suara PPP pada pemilihan umum 2014. Kondisi yang terjadi pada dapil I juga tidak jauh dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan di dapil V.

Faktor informal lainnya seperti jaringan dan sumber dana keuangan lebih menonjol berlaku di dapil I untuk menjadi pertimbangan penetapan kandidasi calon legislatif yang akan menduduki jabatannya pada parlemen. Jaringan yang terjadi dengan menentukan adanya hubungan kekeluargaan dan pertimbangan jaringan kekerabatan. Hubungan kekeluargaan yang terjadi yaitu antar saudara seperti calon yang bernama Abdul Manaf, yang menjadi adik kandung dari Khairul Fattah dimana Khairul Fattah ini merupakan kader dari PPP dan juga masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sampang. Faktor terakhir, sumber daya keuangan, hal ini tidak terlalu menonjol tetapi menjadi pertimbangan juga.

Selain menentukan bagaimana menentukan kandidasi dengan dua faktor formalitas politik dan informalitas politik ada faktor yang juga penting dengan siapa yang akan menentukan kandidasi. Apakah DPP, atau DPW, atau juga DPC? Yang terjadi pada PPP Sampang, yang mendominasi dalam penentuan ini diserahkan seluruhnya kepada tim yang telah di tetapkan oleh partai politik yaitu LPC dan LPP.

Kondisi yang terjadi dalam rekrutmen politik caleg PPP terlihat jelas bahwa budaya mereka masih berlaku dengan pertimbangan-pertimbangan formalitas dan informal yang saling membutuhkan seperti simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan.

Penutup

PPP Sampang melakukan rekrutmen politik terhadap calon legislatif Kabupaten Sampang dengan menggunakan proses formalitas dan mengutamakan adanya kader partai

tersebut. Prosedur formalitas ini dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan partai dan aturan Komisi Pemilihan Umum. Seperti adanya pendaftaran, pengumpulan data-data administrasi keterangan pendidikan, keterangan kependudukan, keterangan surat berperilaku baik dan keterangan yang lain.

Jalur informal politik juga menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting karena secara sosiokultural perkembangan politik yang ada di Sampang memiliki pengaruh besar terhadap peranan kyai yang hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Sampang. Pengaruh ketokohan kyai yang kuat mengakibatkan pertimbangan informalitas politik memberikan daftar calon tetap pada dapil V yang didalamnya memiliki calon-calon yang masih berhubungan dengan keluarga kyai, disisi lain kecamatan yang terdapat pada dapil V terdapat pondok pesantren yang cukup banyak. banyak calon anggota legislatif Partai PPP Dapil V berkompetisi untuk merebutkan mendapatkan dukungan dari kyai hal ini di karenakan wilayah Dapil V terdapat pondok pesantren cukup banyak dari pada Dapil lainnya.

Daftar Pustaka

Amal, Ichsanul. (1996), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam. (2009), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bungin, Burhan. (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huntington, P. Samuel. (2004), *Tertib Politik : Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Miles, J. Mathew dan A. Michael Huberman. (1992), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*, UI Press, Jakarta.

Norris, Pippa dalam Richard Skatz dan William Crotty. (2006), *Hanbook of Party Politic*, Sage Publication, London.

Selzmick, Philip. (1957), *Leadership in administrasion*, Harper and Row, New York.

Surbakti, Ramlan. (2010), *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta.

White, Kenneth, John dalam Richard Skatz dan William Crotty. (2006), *Hanbook of Party Politic*, Sage Publication, London.